

KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA

Fayruz Alkahfi¹ dan Supriyadi²

INTISARI

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif memiliki tujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pasal makar serta mengetahui kebijakan formulasi di Indonesia yang mengakomodir pasal makar ini.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Bahan penelitian adalah bahan pustaka dan dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif terhadap peninjauan kepustakaan dan wawancara yang telah dilakukan. Metode penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah deduksi, penyimpulan dari keadaan yang umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: *Pertama*, Peraturan perundang-undangan terkait dengan pasal makar ini sangat jauh dari implementasi karena terdapat perbedaan penafsiran tentang makar itu sendiri. *Kedua*, Dalam perjalanannya terkait dengan ketentuan dalam pasal makar baik dalam RUU KUHP 2018 maupun dalam RUU KUHP 2019 tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, untuk itu RUU KUHP yang akan sedang dibuat perlu diperhatikan kembali, terlebih terkait dengan pasal makar.

Kata Kunci : Makar, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Delik Politik, RUU KUHP.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

POLICY FORMULATION REGARDING THE ACT OF TREASON IN INDONESIA

Fayruz Alkahfi¹ dan Supriyadi²

ABSTRACT

Research in legal writing objectively aims to recognize the weaknesses of treason articles and the formulation policies in Indonesia that accommodate the treason articles.

The method used in this research is the normative juridical research method. Research materials are literatur review and Data from interviews method. Data analysis that is used in this study was carried out qualitatively and the results were presented descriptively to the literature review and interviews that had been conducted. The method of drawing conclusions from this research is deduction, inference from general to specific circumstances.

This research was conducted with a normative juridical method. Based on the results of the research, it was found that: ***First***, the prevailing laws and regulations related to the act of treason are far from being implemented because there are discrepancies in interpreting the act of treason itself. ***Second***, in the development related to the act of treason provisions there were no significant differences found both in the 2018 ICC Bill and the 2019 KUHP Bill, and for that the upcoming ICC Bill which is currently under the drafting process needs to be reconsidered, especially in regarding the act of treason provision.

Key Words: Act of Treason, Crimes Against State Security, Indonesian Criminal Law Reform, Political Offense, RUU KUHP.

¹ Undergraduate Law Student of Criminal Law, Degree Program, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada